

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP BARANG BUKTI YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN PIDANA YANG DIGUGAT KEPAILITAN (Studi Perkara Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup)

Oleh

Muhammad Ifan

Hukum pidana dan kepailitan adalah dua bidang hukum yang sering bersinggungan, termasuk halnya terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara melalui putusan pengadilan pidana yang digugat kepailitan. Sebagaimana hal ini terjadi terhadap perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group dengan Terpidana Dumeri Als Nuryanto Als Salman Nuryanto. Maka dari itu penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan aset sita umum pailit yang dirampas untuk negara, serta menganalisis hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap aset sita umum pailit yang dirampas untuk negara.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang diperoleh dari hasil pengkajian bahan pustaka baik berupa produk legislasi maupun literatur karya ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, editing, dan sistematisasi. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah sita umum tidak dapat membatalkan sita pidana. Asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* dimana ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis* sehingga sita umum hanya merupakan *lex specialis* dari hukum perdata. Hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap aset sita umum pailit yang dirampas untuk negara adalah, tumpang tindih antara hukum kepailitan dengan hukum acara pidana.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, penulis memberikan saran yaitu, pemerintah perlu melakukan harmonisasi antara hukum kepailitan dan hukum pidana. Selain itu, diperlukan Kesepakatan Bersama mengenai Sita Umum Kepailitan dan Sita Pidana antara Mahkamah Agung dalam hal ini Pengadilan Niaga, Penyidik dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Penyidik PPNS, Organisasi Kurator, Kementerian Hukum dan HAM, Organisasi Advokat.

Kata kunci: Kepailitan, sita umum, sita pidana

ABSTRACT

CRIMINAL LAW STUDY OF EVIDENCE CONFISCATED TO THE STATE THROUGH COURT RULINGS CRIMINAL SUED FOR BANKRUPTCY (Pandawa Mandiri Group Savings and Loans Cooperative Case Study)

By

Muhammad Ifan

Criminal law and bankruptcy are two areas of law that often intersect, including regarding evidence confiscated from the state through criminal court decisions that are subject to bankruptcy. This happened in the Pandawa Mandiri Group Savings and Loans Cooperative (KSP) case with the convict Dumeri Als Nuryanto Als Salman Nuryanto. Therefore, this research aims to analyze the position of general bankruptcy confiscated assets confiscated for the state, as well as analyze obstacles in implementing court decisions regarding general bankruptcy confiscated assets confiscated for the state.

Based on its nature, this research is normative juridical research. Data was obtained from the results of reviewing library materials, both in the form of legislative products and scientific literature. Data collection was carried out through a literature study and a document study. Data management is carried out by examining data, editing, and systematizing. Next, the data was analyzed using qualitative methods in descriptive form.

*The results of this research are that general confiscation cannot cancel criminal confiscation. The legal principle of *lex specialis derogate legi generalis* is that the provisions of the *lex specialis* must be in the same legal environment (regime) as the *lex generalis* so that general confiscation is only the *lex specialis* of civil law. An obstacle in implementing court decisions regarding general bankruptcy confiscation assets confiscated for the state is the overlap between bankruptcy law and criminal procedural law.*

Based on the discussion of the research results, the author provides suggestions, namely, that the government needs to harmonize bankruptcy law and criminal law. Apart from that, a Joint Agreement is needed regarding General Bankruptcy Confiscation and Criminal Confiscation between the Supreme Court, in this case, the Commercial Court, Investigators, in this case, the Police, Prosecutor's Office, Corruption Eradication Committee and PPNS Investigators, Curator Organizations, Ministry of Law and Human Rights, Advocate Organizations.

Keywords: Bankruptcy, general confiscation, criminal confiscation